



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Tawang Suroso bin Kun Herisasi**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kapal Layar 5 Rt.20 No. 39 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon I"**;

**Musdalipa binti Mustafa**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kapal Layar 5 Rt.20 No. 39 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Botg tertanggal 16

Halaman 1 dari 5 halaman Pen.13/Pdt.P/2019/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2019, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada tanggal 10 April 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Irwansyah (Kakak Kandung Pemohon II) karena Ayah Kandung meninggal dunia, kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saini dan Supriyanto semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Achmad Niagara bin Tawang Suroso lahir di Bontang, 12 Desember 2017;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-09/Kua.16.08.01/PW.01/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);

Halaman 2 dari 5 halaman Pen.13/Pdt.P/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah; Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Tawang Suroso bin Kun Herisasi) dengan Pemohon II (Musdalipa binti Mustafa), yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 26 Februari 2019 para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan walaupun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Botg tertanggal 14 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 12 Maret 2019, para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan pada persidangan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon akan mencabut permohonan pengesahan nikah yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 12 Maret 2019 para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan pada

Halaman 3 dari 5 halaman Pen.13/Pdt.P/2019/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon akan mencabut permohonan Pengesahan Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Botg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 H., oleh kami Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Pen.13/Pdt.P/2019/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fitriah Azis, S.H**

**Nurqalbi, S.HI**

**Panitera Pengganti**

**HIJERAH, S.H, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 halaman Pen.13/Pdt.P/2019/PA.Botg